

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur Review

Dalam sebuah karya penelitian, diantaranya karya tulis berupa skripsi, tidak ada yang bersifat mutlak asli (original) dan benar-benar baru yang dihasilkan oleh seorang penulis ataupun peneliti. Semua bentuk penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian sebelumnya ataupun melakukan revisi atas penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan penelitian ini, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan (comparation) dengan penelitian ataupun tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan.

Kali ini penulis akan mereview beberapa penelitian mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pertahanan serta pengaruhnya bagi pembangunan industri persenjataan di Indonesia.

Review 1 : Eisyia Putri Adiyanti dari Universitas Hassanudin pada 2016 membahas mengenai “*Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Pertahanan*”¹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengembangan pertahanan dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak bagi peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia baik dalam peningkatan Alutsista maupun yang mendukung mobilisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

¹ “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan Pertahanan”, Eisyia Putri Adiyanti, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19388/BAB%20I%2C2%2C3%20SKRIPSI%20ELSYA%20PUTRI%20ADIYANTI.pdf?sequence=1> pada 24 November 2018 pada pukul 16.24 WIB

serta peningkatan bagi pendidikan dan profesionalitas TNI yang dilakukan dengan adanya Transfer of Technology (TOT) dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Korea Selatan.

Negara yang besar harus dijaga oleh angkatan perang yang profesional, kuat, modern dan disegani, angkatan perang tersebut hanya akan terwujud jika didukung oleh Ekonomi yang kokoh sehingga mampu mendukung pembangunan postur kekuatan yang sesuai, ekonomi yang kokoh hanya akan bisa terwujud jika semua warga bangsa sadar akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup di masyarakat dengan menjauhkan diri dari segala macam urusan yang merugikan dan menyedot energi bangsa dan negara.

Kerjasama Bilateral dibidang pertahanan, teknologi, dan militer yang telah dijalin Indonesia dengan Korea Selatan berlangsung 41(empat puluh satu) tahun² dan telah banyak memberikan keuntungan baik bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berbagai upaya senantiasa dilakukan agar kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang optimal, khususnya bagi kepentingan pembangunan di Indonesia yaitu dengan memetik manfaat keunggulan Korea Selatan di bidang ekonomi, pertahanan militer, dan teknologi.

Kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan ini memberikan dampak perubahan terhadap kekuatan militer Indonesia yang ada sekarang, pada sebelumnya ketertinggalan Indonesia ini membuatnya berada pada peringkat bawah pada kekuatan militer di dunia internasional khususnya dibandingkan dengan negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara, kini kekuatan militer Indonesia disegani oleh negara lain seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada zaman Orde Lama.

² <https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx>

Review 2: Referensi dari Idham Lutfhy dari Universitas Pasundan pada tahun 2017 membahas “*Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Pertahanan dalam Konteks pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX*”³.

Dari diadakannya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya dalam pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX memberikan dampak kemajuan bagi pertahanan di Indonesia. Kemajuan ini dirasakan sekali oleh pihak-pihak yang terjun langsung dalam peran mempertahankan kedaulatan NKRI yaitu pihak TNI

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan bidang pertahanan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempertahankan dan menjaga kedaulatan suatu negara atas adanya ancaman-ancaman saat ini. Dengan adanya kerjasama pertahanan tentunya memberikan keuntungan bagi kedua negara, terlebih bagi Indonesia karena melihat wilayah Indonesia yang begitu luas perlu pertahanan yang lebih kuat baik dari wilayah darat, laut, udara.

Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan negara luar karena mengingat kondisi pertahanan Indonesia saat ini yang bisa dikatakan kurang baik, contohnya dari Alutsista militer Indonesia banyak yang sudah usang, dan perlunya peningkatan profesional prajurit. Serta untuk meningkatkan pertahanan tentunya hal yang dibutuhkan seperti anggaran karena dengan adanya anggaran tentu Indonesia dapat menggantikan peralatan militer yang tidak layak pakai.

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah untuk membangun kekuatan alutsista guna meningkatkan pertahanan negara di areal perbatasan Indonesia yang rawan konflik.

³ Idham Lutfhy, *Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Pertahanan dalam Konteks pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX*. Diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/15859/> pada 24 November 2018 pada 16.47 WIB

Review 3: Referensi terakhir dari Alexander Bramantio Admojo Utomo, tahun 2017 membahas “*Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The Joint Declaration on Strategic Partnership*”⁴

Menurut Alexander, pertahanan suatu negara secara militer saat ini tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan atau *man power* saja, namun juga mengandalkan teknologi canggih Alutsista demi menjaga kedaulatan negara. Dalam penelitian ini, Alexander menganalisa tentang proses transfer teknologi militer dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kontribusi transfer teknologi militer terhadap peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia.

2. Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau sejarah diplomatik), dan pakar ekonomi (ekonomi internasional) HI juga merupakan bidang studi legal (Hukum Internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar actor yang melewati

⁴ Alexander Bramantio Admojo Utomo, Skripsi: “*Kontribusi Transfer Teknologi Militer Dari Korea Selatan Kepada Indonesia Melalui Penandatanganan The Joint Declaration on Strategic Partnership*” (Bandung:UNPAR,2017) diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2243/Cover%20-%20Bab%201%20-%203312106sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 10 Desember 2018 pukul 16.51WIB

batas-batas negara. The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat suatu interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Mc. Clelland mendefinisikan:

“Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan. Keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”⁵.

Dalam perkembangan studi Hubungan Internasional dinamika internasional tidak statis akan tetapi selalu dinamis, termasuk dalam mempelajari inter relasi antar negara satu dengan lainnya. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Mochtar Mas’oed berpendapat bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok”⁶

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional, yang mana Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama Internasional, meliputi kerjasama dibidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi, berpedoman kepada politik luar negeri masing-masing. Adapun Konsep kerjasama internasional yang dikemukakan oleh KJ. Holsti adalah:

⁵ Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State* (New York: The Macmillan Press Ltd, 1997), hlm. 174.

⁶ Faisal, "Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli", dalam <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>, diakses 11 Desember 2018

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopak pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak⁷”.

Hubungan Internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional suatu negara dan Ekonomi Politik Internasional, Politik Luar Negeri (PLN) menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. PLN itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (K.J Holsti, 1983:97)

Jack C Plano Dan Ray Olton dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional mengatakan bahwa Politik Luar Negeri adalah sebagai berikut:

“Strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit-politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan suatu bangsa lain, harus didefinisikan dalam pengertian yang cocok dengan bangsa-bangsa lain itu⁸”

Hubungan bilateral dan kepentingan nasional dalam bidang pertahanan untuk mencapai keamanan nasional Indonesia merupakan salah satu konsep yang mendasari terjadinya hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan bilateral menjadi penting bagi suatu negara, karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan bilateral pencapaian tujuan suatu negara akan lebih mudah dilakukan tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan

⁷ K.J Holsti, *Politics International : Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Drs Wawan Juanda) (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987) hlm. 650.

⁸ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 140.

diri dari keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasional mendefinisikan bahwa:

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak(dua negara)”⁹”.

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan selain untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia di bidang pertahanan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas keamanan nasional Indonesia. Keamanan nasional lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman. Kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, diletakkan diatas prinsip-prinsip kerjasama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara. Lebih lanjut Arvind Dutta menjelaskan sebagai berikut:

“Defense cooperation is an ideal tool to advance the national foreign policy objectives by building bridges of friendship, preventing conflicts, building mutual trust and capacities on a global basis. The process signals the political commitment to develop cooperative relations and dispel mistrust and misperception on issues of common military interest. The evolving geo-strategic realities necessitates that policy guidelines be formulated for integrated inter-ministerial planning on issues concerning the external security of the country”¹⁰”

⁹ Didi Krisna(Ed),*Kerjasama Ekonomi Indonesia-Brasil*(Makassar: Unhas),hlm.16.

¹⁰ Arvind Dutta,”*Role of India’s Defense Cooperation Initiatives in Meeting the Foreign Policy Goals*”,dalam institusi pertahanan dan analisis, No.3, July2009(New Delhi:2009),hlm.1.

Makna dari pernyataan Arvind Dutta diatas bahwa kerjasama pertahanan merupakan salah satu jalan dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara dengan membangun kepercayaan satu sama lain.

Pertahanan Indonesia sendiri bermula pada tahun 1945, dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial,ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI.

Doktrin pertahanan (defence,doctrin), atau lebih luas lagi doktrin keamanan nasional (national security doctrine), meliputi berbagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dan arahan bagi penggunaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Strategi pertahanan dimengerti sebagai segenap seni dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan unsur pertahanan, pada masa damai maupun perang, untuk maksimalisasi penggunaan sumber daya dan minimalisasi resiko. Semuanya merupakan sebuah kerangka sistematis dengan perkaitan antara konsep, strategi, dan operasionalnya.

Di Indonesia, gagasan konseptual untuk itu tertuang dalam apa yang dikenal sebagai “sistem pertahanan (dan keamanan) rakyat semesta” sishan (kam) rata, kini mulai disebut sinhanrata, dengan menghilangkan elemen keamanan di dalamnya. Menurut Sayidiman Suryohadiprojo”

“Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) adalah konsep yang ditetapkan bangsa Indonesia sebagai cara menghadapi dan mengatasi serangan dan gangguan yang dilakukan negara bangsa lain terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹¹”.

¹¹ Sayidiman Suryohadiprojo, “Sistem Pertahanan Rakyat Semesta: Hakikat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta” dalam <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634>, diakses 12 Desember 2018.

Pelajaran yang paling jelas tentang implementasi Sishanrata adalah perjuangan kemerdekaan [periode 1945 sampai 1949. Pada masa itu, kekuatan rakyat bersenjata dan tidak bersenjata bersama-sama bangkit melawan penjajahan dan berhasil mengusir penjajah Belanda. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini adalah mencari wujud implementasi dalam tatanan negara modern atas segenap doktrin, sistem dan tatanan yang kita warisi dari masa lalu sejak perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Dalam kaitan Sishanrata pada hakikatnya merupakan perwujudan sistem pertahanan semesta (Total Defence) atas segenap potensi dan sumber daya nasional guna menghadapi berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa.

Dwifungsi ABRI sebagai konsep politik ‘jalan tengah’ dari dinamika politik nasional yang berkembang dimasa lalu, bukanlah nilai yang bersumber pada jati diri TNI. Dwifungsi ABRI seharusnya ditempatkan sebagai konsep sementara yang dibutuhkan oleh bangsa untuk mengatasi keadaan yang berkembang saat itu.

“Sebagai Angkatan Perang TNI bukanlah lembaga politik sebagaimana layaknya partai politik. TNI memang harus tahu dan bahkan harus menjadikan politik sebagai wawasannya, namun politik yang dimaksud adalah politik negara. TNI dalam politik praktis tidak hanya bertentangan dengan logika demokrasi, namun justru bertentangan dengan kodrat TNI itu sendiri¹²”

Untuk menyongsong era Indonesia baru, TNI mutlak perlu mengubah penampilannya keluar dari Dwifungsi ABRI, selanjutnya kembali ke pijakan jati diri TNI. Untuk itu reformasi internal TNI haruslah sungguh-sungguh dilaksanakan. Kesungguhan TNI dalam melaksanakan reformasi internalnya, akan menjadi tepat manakala TNI bersikukuh pada logika dan etika politik yang dilandasi oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan¹³.

¹² Wirahadikusumah, Agus. Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 303)

¹³ Wirahadikusumah, Agus. Indonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. Hlm 312)

Pada masa kejayaan Dunia Barat, pendekatan pembangunan berdasarkan pada asumsi bahwa “modernisasi” dicirikan oleh dunia barat (negara-negara yang lebih kaya dan lebih kuat pada saat itu), yang mampu maju dari tahap awal keterbelakangan. Menurut pakar ekonomi Amerika Serikat, Walt Whiltman Rostow :

“Ada lima tingkatan yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan industri: (1)Masyarakat Tradisional, (2)Masyarakat Transisi, (3)Lompatan, (4)Mendorong kematangan Teknologi, (5)Konsumsi massa yang tinggi¹⁴”

Rostow dalam argumennya mengatakan bahwa loncatan ekonomi pada mulanya harus dipimpin oleh sektor ekonomi individual. Keyakinan ini menggemakan tesis milik David Ricardo mengenai keunggulan komparatif dan mengkritisi dorongan revolusioner Mrxis untuk kemandirian ekonomi karena mendorong pengembangan awal dianatara satu atau dua sektor atas pengembangan semua sektor secara merata.

3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Implementasi program kerjasama pertahanan antara Indonesia-Korea Selatan, perlu reorientasi serta strategi kebijakan melalui langkah reorganisasi, rasionalisasi dalam mewujudkan profesionalisme serta modernisasi pembangunan industri sistem pertahanan Indonesia”

¹⁴ 1Mallick Oliver, “Rostow’s five-stage model of development and relevance in Globalization” (Newcastle: University of Newcastle,2005)

4. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu:

Tabel 2.1

Operasional Variable dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis	Indikator	Verifikasi
Variabel Bebas: Strategi pembangunan industri sistem pertahanan Indonesia	1.Transfer Technology	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia dan Korea Selatan Kerjasama pada pembangunan kapal selam, dan terdapat dua kesepakatan kerjasama untuk melaksanakan Pelatihan dan Produksi bersama. Dan Korea bersedia untuk memberikan teknologi pembangunan kapal selam melalui skema joint production. Serta pelatihan kepada personel dari galangan kapal dalam negeri. (sumber: https://www.researchgate.net/publication/317382302_Evaluasi_Kinerja_KKIP_Dalam_Kerjas

		<p>ama_Republik_Indonesia- Korea_Selatan_Pada_Pembang unan_Kapal_Selam_Untuk_Me ndukung_Ketahanan_Alutsista_ TNI_Angkatan_Laut)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Indonesia Korea Selatan di bidang Pertahanan dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. (sumber: Idham Luthfy, Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di bidang Pertahanan dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Diakses dari http://repository.unpas.ac.id/15859/ pada 15 Desember 2018 pada 10.48 WIB) • Sesko AU luluskan 108 Pamen angkatan 54 dan terdapat beberapa perwira menengah dari Korea Selatan.
--	--	--

		(sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/2017/11/17/seskoau-luluskan-108-pamen-angkatan-ke-54-413981)
	2. Misi Pertukaran Siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan kerjasama militer dan pertahanan kedua negara dapat dilihat dari pertukaran kunjungan perwira kedua negara termasuk pertukaran personel untuk bergabung dalam pendidikan dan pelatihan serta pengenalan sistem utama senjata dari kedua negara. (sumber: https://jakartagreater.com/perwira-sesko-militer-korea-selatan-studi-strategis-di-mabes-tni/) • Pada saat perancangan dan perekayasaan kapal selam satu dan dua itu dijadikan sarana untuk pembelajaran bagi peserta dari PT.PAL, kemudian

		<p>dari kapal ketiga itu pembangunannya dalam bentuk blok-blok yang di laksanakan di Korea tetapi teknisi-teknisi PT.PAL sudah ikut berpartisipasi, dan kemudian nanti perangkaiannya dilakukan di PT.PAL (sumber: Laksamana Pertama TNI Suryo Djati Prabowo, Ketua Project Oficer Katra Laut: wawancara tanggal 7 April 2016, https://www.researchgate.net/publication/317382302_Evaluasi_Kinerja_KKIP_Dalam_Kerjasama_Republik_Indonesia-Korea_Selatan_Pada_Pembangunan_Kapal_Selam_Untuk_Mendukung_Ketahanan_Alutsista_TNI_Angkatan_Laut)</p>
	3.Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran program

	Logistik	<p>kementerian pertahanan/TNI T.A.2018 dari program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur kemhan yang bersumber dari Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) U.O. Kemhan ke program modernisasi Alutsista dan non Alutsista. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan kemhan/TNI yang berkaitan dengan urgensi yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2019. (sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI,5 Sept 2018)</p>
--	----------	---

Variabel Terikat: Profesionalisme serta Modernisasi Pembangunan Industri sistem Pertahanan Indonesia	1.Rasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • RS TNI menerima masyarakat umum, itu keputusan pemerintah. Memang menjadi beban, karena ini desainnya untuk prajurit dan keluarganya tapi tiba-tiba kita tidak boleh menolak warga umum <p>(sumber: https://news.detik.com/berita/d-3415358/komisi-i-dpr-prajurit-tni-butuh-rumah-dan-tambahan-remunerasi)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Sifat, watak, tabiat sebagai

	2.Reorganisasi TNI	<p>angkatan perang, mengharuskan setiap prajurit TNI dilandasi secara kuat oleh ketulusan membunuh/dibunuh, menghancurkan/dihancurkan musuh/lawan. Wajar saja dalam menangani urusan politik praktis menempatkan “oposisi” sebagai “lawan politik”. (sumber: Wirahadikusumah, Agus. <i>Indonesia Baru dan Tantangan TNI</i>. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1999. Hlm 303)</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan reorganisasi TNI yang mendukung arah perubahan (termasuk dalam reorganisasi itu adalah perubahan ABRI menjadi TNI dan Polri). <p>(sumber: Wirahadikusumah, Agus. <i>Indonesia Baru dan Tantangan TNI</i>. Jakarta:Pustaka</p>
--	--------------------	---

		Sinar Harapan,1999. Hlm 331)
--	--	------------------------------

5. Skema Kerangka Teoritis



